



Implementasi Kebijakan Tuntas Baca Al Qur'an (TBA) melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Sumbawa Barat

Hanifah¹, Ahmad Yamin², Superman³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: hanipahs2inov@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-05 Keywords: <i>Policy;</i> <i>Completely Read the Qur'an;</i> <i>PKK.</i>	In its implementation, the TBA program generally focuses on the target of increasing Islamic religious literacy for the community in the West Sumbawa Regency area. The TBA program can be said to be successful in supporting increased Islamic religious literacy in the KSB community. The aim of this research is to describe and argue the implementation of the Complete Al-Quran Reading policy through the Family Welfare Development Program (PKK) in West Sumbawa Regency. The research method used is descriptive qualitative, data collection using observation, interview and documentation techniques, data analysis by reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the policy of completing reading the Al-Quran is carried out by 1) implementing the policy of reading the Al-Quran by involving all parties, both government and society, 2) Content of the policy, the benefits received by the group after the policy is implemented, 3) Policy Environment, there are regulations from the government policy with the regent's regulations regarding West Sumbawa Regency reciting the Koran. The conclusion is that the policy of completely reading the Qur'an is supported by policy implementation, policy content and policy environment. Suggestions for this policy to be further improved to address illiteracy in reading the Qur'an.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-05 Kata kunci: <i>Kebijakan;</i> <i>Tuntas Baca Al Qur'an;</i> <i>PKK.</i>	Dalam penyelenggaraannya, program TBA secara umum menitikberatkan pada target capaian peningkatan literasi agama Islam bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Program TBA dapat dikatakan sukses dalam mendukung peningkatan literasi agama islam masyarakat KSB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengargumentasikan Implementasi kebijakan Tuntas Baca Al Quran melalui Program Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) di Kabupaten sumbawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa kebijakan tuntas baca Al Quran, dilakukan dengan 1) mengimplementasi kebijakan baca al qur an dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, 2) Isi kebijakan, manfaat yang terima oleh kelompok setelah kebijakan diterapkan, 3) Lingkungan Kebijakan adanya regulasi dari pemerintah kabijakan dengan adanya peraturan bupati terkait Kabupaten sumbawa Barat mengaji. Kesimpulan bahwa kebijakan tuntas baca Al Qur'an didukung oleh implementasi Kebijakan, isi kebijakan dan lingkungan Kebijkan. Saran agar kebijakan ini semakin ditingkat untuk menuntaskan buta baca Al Qur'an.

I. PENDAHULUAN

Bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan dan memilih serta merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan yang merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk dapat mengusahakan dan juga menyelenggarakannya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan ber-taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur. Agama islam

sebagai pedoman hidup kaum muslim tentunya tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan tuhan saja, tetapi juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah pendidikan.

Landasan pokok dalam pendidikan agama islam adalah Al Qur an. Al Qur an merupakan tuntunan dan tuntutan dalam membentuk akhlaq yang mulia dalam membentuk tingkah laku yang berarti bahwa, seseorang akan melahirkan sebuah tata nilai yang luhur dan mulia jika mengikuti sumber dari Al qur an sebagai pedoman untuk membangun kelem-

bagaikan suatu masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk sebuah kebudayaan dan peradaban yang islami.

Dalam rangka membumi Al Quran sebagai tuntunan dan tuntutan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat melalui Pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten mencanangkan program Tuntas baca Al Qur'an (TBA). Program ini dilatar belakangi oleh berdasarkan hasil survey melalui Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2015 terdapat 54% populasi umat islam yang tidak bisa membaca Al-Qur'an di Kabupaten Sumbawa Barat dengan rincian sekitar 21.349 orang laki-laki dan sekitar 22.546 orang perempuan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melihat tingginya Ummat islam yang tidak bisa membaca Al-Qur'an ini sebagai masalah yang harus direspon dengan segera. Untuk merespon hal tersebut pada tanggal 30 Juni 2016 Kepala Daerah terpilih mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Mengaji, dalam mengimplementasikan gerakan tersebut maka dibuatlah Gerakan Tuntas Baca Al-Qur'an (TBA) melalui Pemberdayaan Gotong Royong yang melibatkan partisipatif beberapa instansi dan lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dibawah koordinator Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di masing-masing kecamatan di seluruh wilayah KSB.

Dalam penyelenggaraannya, program TBA secara umum menitikberatkan pada target capaian peningkatan literasi agama Islam bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Program TBA dapat dikatakan sukses dalam mendukung peningkatan literasi agama islam masyarakat KSB. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka tuntas baca Al-Qur'an berdasarkan angka sebaran penerima Al-Qur'an sejak tahun 2016 (sebanyak 612 orang) sampai dengan tahun 2022 (sebanyak 1000 orang).

Peningkatan jumlah masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat yang tuntas baca Al Qur an yang terus meningkat dari sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 tentunya akan membaca dampak pada Pembangunan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya menuju masyarakat Madani (Civil Society). Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implimentasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu

tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasiona-lisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1979 dalam Solichin Abdul Wahab (2012:135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Selain definisi semacam itu, implementasi kebijakan dapat pula dianggap suatu proses, keluaran (output) dan hasil akhir (outcome). Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (a serial of decisions) dan tindakan (actions) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi Negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. Menurut Van Meter dsn Van Horn, 1975 dalam Leo Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabater, 1983 dalam Leo Agustin (2006: 139) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi-

kan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan pertanyaan kebijakan (policy statement). Dalam aktifitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telah banyak dikemukakan oleh para banyak ahli kebijakan diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), Marilee S. Grindle (1983), dan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), dan Cheema dan Rondinelli (1983), dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1991).

Menurut Marilee S. Grindle 1980 dalam Subarsono (2005:93) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of police) dan lingkungan implementasi (konteks of police). Variabel isi kebijakan mencakup: Pertama, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan. Kedua, jenis manfaat yang diterima oleh target group. Ketiga, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan. Keempat, apakah letak dari sebuah program sudah tepat. Kelima, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci. Keenam, apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: Pertama, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kedua, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. Ketiga, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Menurut Mazmanian dan Sabatier, 1983 dalam Subarsono (2005:94) terdapat tiga kelompok variabel yang berpengaruh juga terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu: Pertama, karakteristik dari masalah (tractability of the problem). Kedua, karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation). Ketiga, variabel lingkungan (non statutory variables affecting implementation). Kelompok variabel karakteristik masalah mencakup: a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; b) Tingkat

kemajemukan dari kelompok sasaran; c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; d) Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.

Kelompok variabel karakteristik kebijakan/undang-undang mencakup: a) Kejelasan isi kebijakan; b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut; d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; c) Sikap dari kelompok pemilih; d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Menurut Meter dan Horn, 1975 dalam Subarsono (2005:99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi para agen implementasi. Kedua, sumberdaya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun non manusia. Ketiga, hubungan antar organisasi, dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Keempat, karakteristik agen pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kelima, kondisi sosial politik dan ekonomi, yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Keenam, disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yaitu: a) respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Menurut Cheema dan Rondinelli, 1983 dalam Subarsono (2005:101) mengatakan ada empat

kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu: a) kondisi lingkungan; b) hubungan antar organisasi; c) sumber daya organisasi untuk implementasi program; d) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Sedangkan menurut Weimer dan Vining, 1999 dalam Subarsono (2005:103) menegaskan ada tiga yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program yaitu: a) logika kebijakan; b) lingkungan kebijakan; c) kemampuan implementor kebijakan.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pakar kebijakan diatas, secara umum terlihat bahwa para ahli kebijakan tersebut memiliki variasi pandangan dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam variasi pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena ada banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas (Sudarto, 1997: 66).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan: "Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan juga berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung, 2008:335-336).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tentang implementasi Kebijakan tuntas Baca Al Qur'an yang dilaksanakan oleh oleh Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) Kabupaten Sumbawa dengan indikator antara lain:

1. Implementasi kebijakan dengan unsur-unsurnya adalah: 1) Pola Komunikasi, 2) Sumber daya pengajar, 3) komitmen keberlanjutan yang diprogramkan oleh PKK, 4) tugas pokok dan fungsi PKK dsalam menjalankan program TBA.
2. Isi Kebijakan (content of Policy) dengan unsur penunjang yaitu : 1) Keinginan dari kelompok sasaran serta hasil yang akan di capai dari suatu program yang di jalan, 2) manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran 3) perubahan yang diinginkan setelah program diterapkan, 4) metode yang diterapkan dalam pendekatan program, 5) siapa-sipa saja yang terlibat dalam program tersebut sehingga program berdaya guna dan berhasil guna, 6) adanya sumber daya pendukung dari program tersebut sehingga program tersebut menjadi tepat sasaran sesuai dengan harapan dari pengambil kebijakan.
3. Lingkungan kebijakan dengan unsur poenunjang yaitu: 1) strategi yang di jalan oleh PKK kabupaten sumbawa barat melalui komunikasi dengan semua stake holder pendukung kebiujakan TBA, 2) adanya regulasi dalam bventuk peraturan bupati Nomor 22 tahun 2016 tentang Gema Mengaji yang menjadi dasar penyelenggarakan kebijakan TBA oleh PKK kabupaten 3) terkait dengan respon dari masyarkat sebagai subyek sekaligus obyek dalam penyelenggaraan Program Tuntas Baca Al Quran.

Implementasi kebijakan secara teoritis menurut Menurut Marilee S. Grindle 1980 dalam Subarsono (2005:93) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of police) dan lingkungan implementasi (conteks of police). Variabel isi kebijakan mencakup: Pertama, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan. Kedua, jenis manfaat yang diterima oleh target group. Ketiga, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan. Keempat, apakah letak dari sebuah program sudah tepat. Kelima, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. Keenam, apakah

sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Adhi Susanto yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pandai membaca Al Qur'an di Kecamatan Bangkinang kota Kabupaten Kampar dengan hasil penelitian sebagai berikut : Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal, itu dibuktikan masih banyak sekolah-sekolah yang belum melaksanakan program ini dan masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya Program Pandai Membaca Al-Quran. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tentang PAndai Membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ini adalah Partisipasi Masyarakat, Dana/Biaya dan Sarana Prasarana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini.

Terkait dengan metode Tsaqifah sejalan dengan penelitian dari Supriyanto dkk. Yang berjudul Implementasi metode tsqifah dalam pembelajaran membaca Al Qur an bagi orang dewasa. Metode ini sebuah metode alternatif pembelajaran baca tulis Al-Quran yang sedang berkembang di Indonesia, sebagai salah satu alternatif metode untuk mengatasi buta huruf Al-Quran di kalangan umat Islam. Metode ini dirancang khusus untuk orang dewasa yang belum mampu membaca Al-Quran atau untuk yang pernah belajar dan masih terbatah-batah membacanya. Dan perlu diketahui metode ini bukan untuk anak TK atau TPA, karena untuk anak-anak sudah ada metode khusus bagi mereka, misalnya metode qiraati, iqra, dan lain sebagainya.

Metodologi pembelajaran yang digunakan di buku ini adalah metodologi pembelajaran orang dewasa, simpel, praktis dan cepat. Maka tsaqifa tepat bila diajarkan kepada yang mempunyai kesibukan tinggi dan tidak mempunyai banyak waktu, ini sangat tepat karena untuk bisa membaca Al-Quran hanya perlu waktu lima kali pertemuan saja dan setiap pertemuan dengan durasi waktu satu stengah jam sudah cukup. Metode ini mempunyai karakteristik unik dibanding metode lain yaitu sistematis pola pembelajarannya, fleksibel sistem pengajarannya, variatif pembahasannya, praktis dan CBSA (cara belajar siswa aktif).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Implementasi kebijakan Tuntas Baca Al Quran melalui Program Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) diterapkan melalui; 1) Pola Komunikasi, Sumber daya pengajar, komitmen keberlanjutan yang diprogramkan oleh PKK, dan tugas pokok dan fungsi PKK dsalam menjalankan program TBA. Kemudian, 2) membuat sebuah isi kebijakan (content of policy) yang terdiri atas Keinginan dari kelompok sasaran serta hasil yang akan di capai dari suatu program yang di jalan, manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, perubahan yang diinginkan setelah program diterapkan, metode yang diterapkan dalam pendekatamn program, siapa-sipa saja yang terlibat dalam program tersebut sehingga progaram berdaya guna dan berhasil guna, dan ada sumber daya pendukung dari program tersebut sehingga program tersebut menjadi tepat sasaran sesuai dengan harapan dari pengambil kebijakan. Lalu kemudian, 3) terdapat Lingkungan kebijakan dengan unsur poenunjang meliputi, strategi yang di jalan oleh PKK kabupaten sumbawa barat melalui komunikasi dengan semua stake holder pendukung kebiujakan TBA, adanya regulasi dalam bventuk peraturan bupati Nomor 22 tahun 2016 tentang Gema Mengaji yang menjadi dasar penyelenggarakan kebijakan TBA oleh PKK kabupaten 3) terkait dengan respon dari masyarkat sebagai subyek sekaligus obyek dalam penyelenggaraan Program Tuntas Baca Al Qur'an.

B. Saran

Perlu diperbanyak lagi program-program yang mendukung untuk dapat lebih mengembangkan secara luas program Tuntas Baca Al Quran melalui Program Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Pembinaan secara berkelanjutan untuk Penguatan di bidang Sosial budaya dan keagamaan melalui program Tuntas Baca Al Quran melalui Program Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

DAFTAR RUJUKAN

Adhi Susanto,2017. Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. *JOM FISIP* Vol. 4 No. 1: 1-11.

- Ahmad Firdaus, 2019, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran Smpn 006 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7 (3): 1207-1220.
- Ahmad Fuadi, Rani Febriyanni, & Hayatun Sabariah. 2021. Penerapan Metode Al-Hira' Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa MTS Babussalam. *Journal of Educational and Language Research*. Vol.1, No.4, 287- 302.
- Ali Attamasini, 2021. Pengaruh Seni Baca Al-Qur'an Terhadap Peningkatan Kemampuan Baca Al-Qur'an di MI Poemusgri kelurahan Sindujoyo Gresik. *CEJou* Vol 02 No 01.
- Dadang Mashur. 2016. Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan Madani. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 4, Nomor 2: 87-156.
- Farikhah. 2021. Meningkatkan Keterampilan Membaca Al-Qur'an Melalui Metode Talaqqi Pada Ayat 190-191 Dan 159 Q.S. Ali Imran. *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education*. Volume 8 Nomor 1; 86-98.
- Kholifah Dwi Wijayanti. 2021. *Implementasi Program Baca Tulis Al-Quran (BTAQ) Kelas 3B di MI Sultan Agung Babadan Baru*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Main Sufanti, Beti Kurniawati, Maryam Sri Muhaimini, & Jeni Nur Cahyati. 2021. Pendampingan Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Bagi Kader Aisiyyah Ranting Ngadirejo Pada Masa Pandemi Covid-19. *SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. Volume 5, Nomor 1, 615-623.
- Mila Kartika, & Alfurqan. 2022. Problematika Peserta Didik dalam Membaca Al-Qur'an di SMP Negeri 1 Lembah Melintang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 6 Nomor 2; 9378-9385.
- Mochamad Nasichin Al Muiz, & Choiru Umatin. 2022. Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Quran Santri Melalui Metode Ummi di Pesantren Pelajar Al-Fath Kediri. *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 6(1): 78-86.
- Mughniatul Ilma, & Rifqi Nur Alfian. 2020. Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*., Volume 1, Nomor 1.; 25-46.
- Muhammad Soim. 2015. Miniatur Masyarakat Madani (Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam). *Jurnal Risalah*, Vol.26, No.1.; 23-32.
- Muslikah, 2021. Metode Tutor Sebaya Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Alquran (BTQ) Secara Baik Dan Benar Sesuai Dengan Kaidah Ilmu Tajwid Di Mts. Negeri 2 Sragen. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pengajaran*. Vol 1. No.1; 136- 140.
- Nur Hidayati, 2021. Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Melalui Metode Resitasi Siswa Kelas V SDN Purwareja. *Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1 No. 1, 631-637.
- Nurdinah Muhammad. 2017. Masyarakat Madani Dalam Perspektif Al- Qur'an. *Al-Mu'ashirah* Vol. 14, No. 1: 20-30.
- Samsul Hidayat, 2019. Penerapan Metode Quantum Hijaiyah Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Al-Quran Komunitas Muallaf Di Kalimantan Barat. *Jurnal Tabligh*. Volume 20 No 1: 68-87.
- Siti Ayamil Choliyah. 2015. Peningkatan Prestasi Belajar Membaca al-Qur'an dengan Metode Yanbu'a. *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2: 147-172.
- Sujiyono, 2016. Peningkatan Kemampuan Siswa Membaca Al Quran Dengan Metode *Peer Tutoring* Di SMAN 2 Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Serambi PTK*, Volume III, No.2: 33-43.
- Supriyanto, & Muhammad Faiq Harisudin. 2016. Metode Tsaqifa dalam Pembelajaran Membaca al-Qur'an Bagi Orang Dewasa. *Jurnal At-Ta'dib*. Vol. 11, No. 2: 286-303.